



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: **6** /HK.01.01/K.SB-18/5/2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 9/HK.01.01/K.SB-
18/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KOTA SAWAHLUNTO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan personil dalam Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Sawahlunto, maka perlu melakukan perubahan ketiga atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor : 9/HK.01.01/K.SB-18/10/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Sawahlunto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor : 9/HK.01.01/K.SB-18/10/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Sawahlunto pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

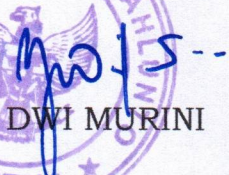
Memperhatikan : Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Sawahlunto Nomor : Sprin/702/IV/RES/1.2.4/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Nama Personil Polres Sawahlunto yang ditunjuk sebagai Personil Sentra Gakkumdu Kota Sawahlunto.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Ketiga Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor : 9/HK.01.01/K.SB-18/10/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Sawahlunto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah melakukan Pengawasan Pemilihan, Menyidik dan Menuntut Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Undang-Undang.
- KETIGA : Kelompok Kerja Sentra GAKKUMDU sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA mulai bertugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja Sentra GAKKUMDU sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mendapatkan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023. (SP DIPA.115.01.2.686218/2023 tanggal 23 Desember 2022).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 3 Mei 2023

KETUA,

DWI MURINI



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

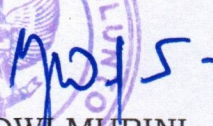
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
5. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Kota Padang.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 6 /HK.01.01/K.SB-18/5/2023
TANGGAL : 3 MEI 2023
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR : 9/HK.01.01/K.SB-
18/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU KOTA SAWAHLUNTO PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA	HONORA RIUM (Rp)
1.	DWI MURINI, S.Pd.,M.Pd.	Ketua Bawaslu Sawahlunto	Penasihat /Pengarah	1.600.000
2.	AKBP. PURWANTO HARI SUBEKTI, S.Sos.	Kepala Kepolisian Resor Sawahlunto	Penasihat /Pengarah	1.600.000
3.	ANDARIAS D'ORNEY, S.H.,M.H Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19691023 199103 1 004	Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto	Penasihat /Pengarah	1.600.000
4.	FIRA HERICEL, S.Sos.	Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas Humas Bawaslu Sawahlunto	Pembina / Penanggung Jawab	1.450.000
5.	KOMPOL. ASNOMI NANDA, S.H.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Sawahlunto	Pembina / Penanggung Jawab	1.450.000
6.	NAZIF FIRDAUS, S.H.,M.H Jaksa Muda (III/d) NIP. 19860622 200812 1 001	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sawahlunto	Pembina / Penanggung Jawab	1.450.000
7.	ARLIN JUNAIDI, S.Pt.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sawahlunto	Koordinator	1.050.000
8.	HENDRIO SUHERMAN, S.H.,M.H Jaksa Muda (III/d) NIP. 19850610 200812 1 001	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sawahlunto	Koordinator	1.050.000
9.	AKP. R.J. AGUNG PRATOMO, S.I.K.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sawahlunto	Koordinator	1.050.000
10.	MAGHFIRAWATI ALDILA, S.E. NIP. 19820626 200312 2 002	Koordinator Sekretariat Bawaslu Sawahlunto	Anggota	950.000
11.	FAKHURU ROZI, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Sawahlunto	Anggota	950.000
12.	RESNAWATI, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Sawahlunto	Anggota	950.000

lh

13.	FEBDORI ARMANSYAH, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Sawahlunto	Anggota	950.000
14.	HADI KOEMORO, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Sawahlunto	Anggota	950.000
15.	YEFIN ASBRAM, S.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Sawahlunto	Anggota	950.000
16.	FIRA INDRA, A.Md.	Staf Sekretariat Bawaslu Sawahlunto	Anggota	950.000
17.	AIPDA. ANTONI SIREGAR, S.H. M.H.	Kanit III Tipidkor Kepolisian Resor Sawahlunto	Anggota	950.000
18.	BRIGADIR. ANDRE DWI PUTRA	Banit Reskrim Kepolisian Resor Sawahlunto	Anggota	950.000
19.	BRIPTU. RENDI KASDEWA	Banit Ident Kepolisian Resor Sawahlunto	Anggota	950.000
20.	BRIPTU. RIDHO CARTES, S.H.	Banit Reskrim Kepolisian Resor Sawahlunto	Anggota	950.000
21.	ARIEF HIDAYAT, S.H. Ajun Jaksa Madya (III/a) NIP. 19941223 201902 1 003	Kasubsi Ideologi, Politik. Pertahanan Keamanan, Sosial Budaya, Kemasyarakatan Teknologi Informasi, Produksi Intelejen dan Penerangan Hukum Kejaksaan Negeri Sawahlunto	Anggota	950.000
22.	MENTARY MEIDIANA, S.H Ajun Jaksa Madya (III/a) NIP. 19960525 202012 2 029	Jaksa Fungsional	Anggota	950.000

KETUA,

 DWL MURINI